

Secara Global Kaum Wanita Masih Tertindas

Oleh: Ariel Heryanto

Diskriminasi gender/seksual yang menempatkan wanita di bawah pria melintasi (hampir) semua batas zaman, usia, bahasa, kebangsaan, kelas sosial, ras-suku-etnisitas, atau pun agama. Paling tidak begitulah pemahaman umum para cendekiawan mutakhir.

Globalnya diskriminasi tersebut memudahkan terbentuknya solidaritas global bagi kaum perempuan dari berbagai tempat, zaman dan latar-belakang. Akibatnya, semakin lapuklah pendapat kaum kolot yang ingin melestarikan diskriminasi itu bahwa gerakan feminisme cuma cocok pada masyarakat atau golongan tertentu saja.

Tapi perbedaan kebangsaan, kelas sosial, ras-suku-etnisitas, bahasa dan agama biasanya juga merupakan sumber dan dasar berbagai diskriminasi dan penindasan sosial. Biasanya pula aneka penindasan itu tidak berlangsung terpisah-pisah. Mereka tumpang-tindih, bersamaan dengan praktek penindasan gender/seksual.

Kompleksitas Persoalan

Bercampur-aduknya berbagai penindasan itu tidak memungkinkan analisa diskriminasi seksual/gender dan perjuangan melawannya secara terisolasi dari berbagai bentuk penindasan lain yang tak kalah tua dan mapannya. Karena itulah pemahaman yang menyedihkan tentang nasib perempuan mudah didapat manakala persoalan perempuan dianalisa secara terpisah dari proses penindasan sosial lain. Perjuangan oleh/bagi kaum perempuan juga cenderung macet atau kandas jika perjuangan itu menyangkal kompleksitas penindasan sosial yang majemuk tersebut.

Memang benar, secara global kaum wanita masih tertindas dominasi kekuasaan kaum pria biar pun gerakan emansipasi sudah berkembang di mana-mana. Dalam bidang ekonomi pendapatan dan partisipasi wanita meningkat, tapi tak pernah setinggi kaum pria. Dalam bidang politik, jumlah wanita menduduki jabatan kepala negara, anggota kabinet, parlemen atau pimpinan partai politik tak pernah sebanyak lelaki. Dalam praktek seni dan budaya atau agama, wanita tak pernah sederajat dengan lelaki. Bahkan mereka lebih sering dijadikan obyek kekuasaan kaum pria.

Tapi semua itu hanyalah sebagian dari gambaran yang nyata, betapa pun pentingnya bagian itu. Itu baru sebagian dari kenyataan yang diisolasi dari realitas yang lebih kompleks.

Wanita bukan satu-satunya kelompok sosial di dunia ini yang tertindas secara turun-temurun atau global. Jenis kelamin cuma salah satu sarang diskriminasi sosial. Diskriminasi yang tak kalah hebatnya dapat bersumber dari identitas kebangsaan, keturunan, keyakinan religius, atau kebahasaan. Semua identitas ini biasanya diberikan kepada se-

seorang, bukan pilihan bebas.

Lagi pula orang tak hanya beridentitas seksual/gender. Setiap perempuan, juga lelaki, dibebani identitas kebangsaan, keturunan, kelas sosial dan sebagainya. Akibatnya, secara nyata nasib kaum wanita tak pernah universal dan uniform. Hubungan analogis antara ibu rumah tangga dan babu, nyonya geromo dan WTS, pengurus Dharma Wanita dan cewek feminis radikal bisa memberikan ilustrasinya. Selalu ada sebagian dari kaum wanita yang hidup berlimpah harta, gengsi dan kuasa yang tersedot dari penderitaan kaum wanita lain yang hidupnya berlumur darah dan air-mata.

Hingga kini agenda penelitian yang masih menantang ialah pengkajian analitis tumpang-tindih diskriminasi yang teranyam menjadi berbagai penindasan sosial tersebut. Kapan dan mengapa di suatu konteks tertentu suatu corak penindasan (misalnya seksual) lebih menonjol ketimbang corak yang lain.

Kasus Empiris & Hipotesis

Belum lama ini terdengar peristiwa sensasional sebagai "kasus Sulastris". Itu kasus gugatan terhadap satu keluarga yang dituduh menganiaya pembantu rumah tangganya yang bernama Sulastris. Tidak akan dipersoalkan benarkah penganiayaan itu terjadi, atau siapa yang bersalah dalam kasus itu.

Yang boleh dan menarik untuk diteliti ialah bagaimana sebagai sebuah "isu", kasus itu dipersepsi masyarakat (di mana indra kepekaan mereka); bagaimana dibicarakan (apa istilah dan struktur wacana yang dipilih; diberitakan media massa (apa nilai/fokus berita yang dipilih insan pers, dan dimungkinkan oleh "Pers Pancasila"); atau bagaimana ditanggapi publik massa (solidaritas dan sentimen apa yang bergelora dan terungkap).

Sepintas lalu kelihatannya peristiwa itu dijelaskan sebagai konflik "kelas sosial" atau "kwasi-kelas sosial". Tegasnya antara buruh dan majikan. Tapi benarkah demikian? Jika pengamatan sepintas lalu itu tidak ngawur,

maka pertanyaan pertama yang segera mencuat ialah apakah peristiwa itu sempat membangkitkan solidaritas kaum buruh, atau khusus para babu? membangkitkan kemarahan terhadap kaum majikan rumah-tangga, kalau tidak pada lingkup nasional ya pada tingkat kecamatan, RT/RW?

Mungkin tanpa ragu pertanyaan itu akan dijawab dengan "tidak". Sepanjang pengetahuan, belum ada bukti demikian. Tentu saja itu bukan tanpa sebab. Dalam tata hubungan kerja industrial maupun domestik yang "Pancasila" pada masa Orde Baru ini, tidak ada organisasi mandiri kaum buruh. Apalagi asosiasi khusus babu. Yang ada Serikat Pekerja. Ironisnya, majikan Sulastris yang dituduh menjadi penganiaya justru pengurus serikat itu sendiri.

Kaum "majikan" rumah-tangga memang menguasai tata kerja

per-babu-an. Tapi tak cuma itu. Mereka juga menguasai organisasi semacam serikat kaum pekerja, hukum dan pengadilan, maupun media massa yang mengulas dan membentuk pendapat khalayak tentang kasus seperti "kasus Sulastris".

Jadi, mengapa kasus yang merugikan seorang anggota kelas "babu" dan mencoreng kelas "majikan" bisa meledak dan tidak terbungkam saja? Sebagaimana halnya dengan seks/gender, kelas sosial terbentuk dan bergerak tidak dalam isolasi atau ruang sosial yang hampa. Penganiaya Sulastris bukan cuma majikan. Sulastris bukan hanya seorang babu.

Sulastris juga seorang perempuan. Salah satu majikan penyiksanya, yang pengurus serikat pekerja, berjenis kelamin lelaki. Pertanyaannya kini: apakah kasus Sulastris merupakan kasus konflik seksual? Apakah kasus itu membangkitkan solidaritas sesama perempuan di tanah air — atau sekampung — yang membaca berita media massa tentangnya? Dan membangkitkan gelora amarah khusus kaum perempuan pada lelaki? Betapa sulit menjawab dengan "ya" tegas atau spontan. Ada beberapa hal perlu dipertimbangkan.

Pertama, menurut Sulastris penyiksanya bukan cuma lelaki. Kedua, ada kelompok perempuan swasta yang sudah menyatakan protes dan pembelaan untuk Sulastris. Mereka menamakan diri Kelompok Kebangkitan Perempuan Indonesia, walau sebenarnya mereka sebagian yang maha kecil dari kaum perempuan Indonesia. Mereka datang dari kelas sosial yang secara turun-temurun dilayani kaum babu. Ketiga, mereka tampil ke publik sebagai tamu menteri negara, tapi ditolak oleh sang menteri yang juga berkelamin perempuan.

Kajian tentang Sulastris bisa diteruskan. Tapi dari yang sudah terurai di atas kelihatan gambang betapa rumit persoalan diskriminasi seksual dan emansipasi perempuan dalam realitas empirik yang tidak diisolasi dari berbagai persoalan nyata. Hanya untuk kepentingan kejelasan pembahasan teoritik atau propaganda ideologis, analisa sosial seringkali direduksi atau dimanipulasi sehingga terisolasi dari kompleksitas persoalan nyata. Bagaimana dimensi agama, kewarganegaraan, dan keturunan?

Sebagai WNI di zaman Orde Baru, Sulastris maupun majikannya tidak boleh tak beragama. Mereka diharuskan memiliki salah satu kebangsaan, juga etnisitas, selain stempel "pribumi" atau "non-pribumi". Sosok masyarakat Indonesia dapat dipelajari dari persepsi dan reaksi terhadap kasus-kasus sejenis Sulastris. Adakah yang mempertanyakan identitas agama, suku, atau kadar ke"pribumi"an Sulastris dan penganiayanya?

Seandainya Sulastri dan penganiayanya berbeda berbagai hal (kelas sosial, seksual, agama, kebangsaan, etnisitas, dan usia), penggolongan manakah yang dianggap terpenting oleh masyarakat kita? Kelompok sosial manakah dalam masyarakat Indonesia yang paling siap dan "spontan" dimobilisasi untuk "resah" dan membela Sulastri? Mengapa demikian? Apakah ini gejala khas Indonesia? Ataukah itu gejala khas Indonesia pada masa Orde Baru?

Siapa saja (dan mana yang paling) bersimpati pada nasib TKW yang pulang dari Timur Tengah dengan luka, atau kehamilan akibat diperkosa majikan? Apa dasar simpati itu? Karena TKW itu perempuan? Karena mereka kaum buruh? Karena mereka bangsa Indonesia? Karena mereka berjilbab?

Siapa yang bangga tapi hanya terpendam dalam hati, dan siapa yang secara publik berkesempatan memanfaatkan kejuaraan seorang Susi Susanti di All England baru-baru ini? Kaum perempuan? Kaum WNI "Non Pri-bumi"? Generasi Muda tahun (Bersamb. ke hal. XI. kol. 3-4)

* Penulis adalah staf pengajar Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Secara

(Sambungan dari hal. II)

1980an? Pemda Tasikmalaya? Para pemain bulutangkis? Pengurus PBSI? Bangsa Indonesia?

Majemuk Berjenjang

Penggolongan sosial tidak terjadi karena faktor-faktor yang sepenuhnya obyektif, faktual, alamiah, netral atau universal, walaupun tampaknya begitu dan dipropagandakan seakan-akan begitu. Penggolongan itu dibentuk oleh proses politik dalam sejarah yang panjang sebagai lahan mobilisasi massa, pembentuk solidaritas, atau alat legitimasi berbagai kepincangan politik-ekonomi-budaya.

Setiap konflik sosial bisa ditafsirkan dan ditanggapi secara berbeda oleh berbagai golongan sosial. Setiap golongan punya fanatisme dan kesiapan dimobilisasi yang berlainan baik tingkat maupun wilayahnya (domain). Perbedaan harta bisa sangat penting dalam suatu bidang kehidupan sosial. Gelar lebih dominan pada bidang lain. Peta pembagian wi-

layah dan kadar militansi penggolongan sosial itu beraneka ragam untuk berbagai masyarakat dan berbeda untuk berbagai jaman dalam masing-masing masyarakat.

Ini tidak berarti tata dan konflik sosial terlalu majemuk dan serba kabur untuk dipelajari manusia. Dalam setiap masyarakat biasanya ada satu atau dua penggolongan sosial yang relatif paling dominan. Golongan yang paling berkuasa dalam masyarakat biasanya memaksakan cara menggolong-golongkan masyarakat yang paling menguntungkan kepentingan mereka sendiri.

Di Indonesia kini keturunan, agama dan senapan tampaknya lebih menentukan ketimbang kelas sosial, ideologi, atau jenis kelamin. Ini bukan berarti diskriminasi seksual tak parah. Mungkin ini pertanda bahwa organisasi feminisme dan artikulasi kesadaran tentang penindasan seksual masih tertindih. Gerakan Feminisme bukan tak perlu diteruskan. Yang perlu dibatasi ialah mengisolasi mereka dari proses sosial yang nyata dan kompleks.***